

Faktor penghambat manajemen aksesibilitas pembelajaran siswa difabel di sekolah dasar inklusi

Wartomo^{a,1}

^aUPBJJ Universitas Terbuka, Yogyakarta, Indonesia

¹ wartomo@ecampus.ut.ac.id

* Correspondent Author

KATAKUNCI

Aksesibilitas;
Siswa difabel;
Sekolah dasar inklusi.

ABSTRAK

Penelitian bertujuan mengetahui faktor-faktor yang menghambat manajemen aksesibilitas siswa difabel dalam mengikuti pembelajaran di Sekolah Dasar inklusi. Penelitian dilaksanakan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dipertimbangkan di Propinsi DIY telah menyelenggarakan Sekolah Dasar inklusif bagi siswa difabel. Sampel penelitian adalah 125 siswa difabel yang sedang mengikuti pendidikan di 25 Sekolah Dasar inklusi di empat kabupaten dan satu kota madia Yogyakarta. Penelitian dilaksanakan bulan Mei - Oktober 2017. Sumber data diperoleh secara langsung dari responden atau informan (data primer), data yang diperoleh secara tidak langsung, yakni dari instansi terkait (data sekunder). Data primer antara lain tentang identitas responden, informasi tentang sarana dan prasarana sekolah inklusif, persepsi responden berkaitan dengan aspek sosial, dan aspek aksesibilitas. Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain: angket, dokumentasi, wawancara terstruktur dan mendalam. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian adalah: (1) aksesibilitas bagi siswa difabel sepertinya menjadi persoalan yang cukup pelik dan kompleks untuk dapat direalisasikan di Sekolah Dasar inklusi; (2) untuk mewujudkan aksesibilitas bagi siswa difabel masih banyak hambatan, sangat rumit dan mahal karena pemerintah sangat terbatas untuk merealisasikannya; (3) aksesibilitas fasilitas umum untuk siswa difabel hanyalah soal kemauan baik dari pengambil kebijakan untuk menjalankannya dan kemauan dalam pendidikan untuk selalu mengawal kebijakan tersebut; (4) mewujudkan aksesibilitas pendidikan di Sekolah Dasar inklusi adalah bagaimana mengembalikan martabat kemanusiaan kelompok minoritas termasuk siswa difabel.

KEYWORDS

Accessibility;
Disabled students;
Inclusive elementary schools.

FACTORS INHIBITING ACCESSIBILITY MANAGEMENT FOR STUDENTS WITH DISABILITIES IN ENTERING LEARNING IN INCLUSION ELEMENTARY SCHOOLS

The research aims to find out the factors that hinder the accessibility management of students with disabilities in participating in learning in inclusive elementary schools. The research was conducted in the Province of the Special Region of Yogyakarta. This is considered in the Province of DIY which has organized an inclusive elementary school for students with disabilities. The research sample was 125 students with disabilities who were attending education at 25 inclusive elementary schools in four districts and one city of Yogyakarta. The research was conducted in May - October 2017. The data source was obtained directly from respondents or informants (primary data), data obtained indirectly, namely from related agencies (secondary data). Primary data includes the identity of respondents, information about inclusive school facilities and infrastructure, respondents' perceptions related to social aspects, and aspects of accessibility. In this study several data collection methods were used, including: questionnaires, documentation, structured and in-depth interviews. The data analysis used in this study is a quantitative and qualitative descriptive analysis technique. The results of the research are: (1) accessibility for students with disabilities seems to be a problem that is quite complicated and complex to be realized in inclusive elementary schools; (2) to realize accessibility for students with disabilities there are still many obstacles, very complicated and expensive because the government is very limited in making it happen; (3) the accessibility of public facilities for students with disabilities is only a matter of the good will of policy makers to implement them and the willingness in education to always oversee these policies; (4) realizing

educational accessibility in inclusive elementary schools is how to restore the human dignity of minority groups including students with disabilities.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Pendahuluan

Penelitian tentang aksesibilitas siswa difabel dalam pembelajarn di Sekolah Dasar inklusi merupakan hal yang sangat mendesak yang harus dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu dari tiga pilar yang merupakan Program Depdiknas, yang lebih dikenal sebagai Pilar I yaitu Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan. Sementara itu, Pilar II adalah Peningkatan Mutu dan Daya Saing; dan Pilar III adalah Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik. Perkembangan pendidikan inklusi di Indonesia; sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif bagi anak berkebu-tuhan khusus, pada tahun 2002 pemerintah secara resmi mulai melakukan proyek ujicoba di berbagai 9 propinsi yang memiliki pusat sumber dan sejak saat itu lebih dari 1500 siswa berkelainan telah bersekolah di sekolah reguler, dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 6.000 siswa atau 5,11% dari seluruh jumlah anak berkebutuhan khusus. Sedangkan pada tahun 2007 meningkat menjadi 7,5% atau 15.181 siswa yang tersebar pada 796 sekolah inklusi terdiri dari 17 TK, 648 SD, 75 SLTP, dan 56 SLTA. (Wartanto, 2016, p. 3)

Isu dan permasalahan yang sering dihadapi pendidikan inklusi; sekalipun perkembangan pendidikan inklusi di negara Indonesia cukup menggembirakan dan mendapat apresiasi dan antusiasme dari berbagai kalangan, terutama para praktisi pendidikan, namun sejauh ini dalam tataran implementasinya di lapangan masih dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan aksesibilitas siswa divabel. Penelitian bertujuan mengetahui faktor-faktor yang menghambat manajemen aksesibilitas siswa difabel dalam mengikuti pembelajaran di Sekolah Dasar inklusi (Noya & Ambarwati, 2020, p. 66). Secara umum saat ini terdapat lima kelompok issue dan permasalahan pendidikan inklusi di tingkat sekolah yang perlu dicermati dan diantisipasi agar tidak menghambat, implementasinya tidak bias, atau bahkan menggagalkan pendidikan inklusi itu sendiri, yaitu: pemahaman, implementasi, kebijakan sekolah, proses pembelajaran, kondisi guru. dan tersedianya aksesibilitas siswa divabel. (Kota et al., n.d., p. 460)

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas wajib belajar bagi usia sekolah, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda (Nashihin, 2019b), baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual maupun kondisi fisik, untuk dapat menikmati pendidikan (Wardani, Tarsidi Didi, Hernawati Tati, 2020, p. 13). Pemerataan dan perluasan akses pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sasarannya untuk mewujudkan SDM yang berkualitas adalah sejalan dengan program pembangunan pendidikan secara nasional. Patut disadari oleh semua pihak bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan hal yang tidak dapat ditunda dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, sekaligus untuk menjawab tantangan persaingan dalam era globalisasi. Ditinjau dari segi kepentingan pemerintah sendiri, dengan adanya peningkatan aksesibilitas siswa divabel dalam mengikuti pendidikan di Sekolah Dasar inklusi, akan dapat membantu memecahkan masalah wajib belajar bagi anak usia sekolah termasuk mereka penyandang divabel (Jannah et al., 2021, p. 62). Kondisi ini akan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, dan sekaligus juga untuk menjamin terjadinya efisiensi layanan pendidikan. (Ting, 2007, p. 62)

Siswa divabel merupakan salah satu dari permasalahan sosial yang ada di Indonesia (Ridha et al., 2020, p. 9). Masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif (Seila Rixkina, Armanila, Amsi Yuningsih, 2022). Sementara Becker, Gary S. (2003) menyatakan Social Problems: conditions among people leading to social responses that violate some people's values and norms and cause emotional or economic suffering. Examples of social problem include crime, social inequality, poverty, racism, drug abuse, family problems, and maldistribution of limited resources.

Mencermati uraian di atas, maka siswa divabel disebut masalah sosial karena sebagai sesuatu kondisi yang mengarah kepada reaksi yang melanggar nilai-nilai, norma-norma (Husna Nashihin, 2017) dirasakan banyak orang dan mengakibatkan masalah emosional dan masalah ekonomi. Kekhususan yang mereka alami mengakibatkan adanya ketidaksetaraan sosial, diskriminasi, permasalahan keluarga, pendistribusian yang salah tentang sumber-sumber yang terbatas dan kemiskinan. Shafa Ridha S.A, Muhamad Ngasimurrohman, Riyana Ulfaini, Aulia Ekarini, (2021, p. 2), siswa divabel merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu permasalahan siswa divabel merupakan permasalahan bangsa Indonesia. Mereka hidup sama seperti anggota masyarakat lainnya, ingin dihargai dan menghargai, ingin dicintai dan mencintai, ingin memiliki dan dimiliki, mempunyai karsa dan rasa, mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan sama seperti manusia lainnya. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka permasalahan siswa divabel akan tetap ada ditengah-tengah masyarakat Indonesia apabila tidak ditangani secara benar. Salmah & Tamjidnoor (2019, p. 127) permasalahan yang sangat mendasar tentang siswa divabel adalah kurangnya pemahaman masyarakat maupun aparat pemerintah yang terkait tentang keberadaan siswa divabel. Adanya anggapan bahwa siswa divabel merupakan aib, kutuk, memalukan, dianggap sama dengan orang sakit, dianggap tidak berdaya sehingga tidak perlu diberikan pendidikan, mereka cukup dikasihani dan diasuh untuk kelangsungan hidup (Nashihin, 2019a). Mereka tinggal dirumah, terperangkap dirumah masing-masing, tidak menyusahkan orang lain dan mudah untuk diawasi oleh orang tua atau keluarga. Sebagian dari mereka menjadi bahan obyek sebagai peminta-minta. Keadaan demikian telah berakar kuat di masyarakat, sehingga sangat sulit untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada siswa divabel. Disamping itu fasilitas berupa aksesibilitas fisik dan non fisik untuk Anak Berkebutuhan Khusus relatif sangat terbatas, sehingga mereka sulit untuk bergerak secara mandiri.

Penjelasan atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang siswa divabel Pasal 10:1, menyatakan: "Penyediaan aksesibilitas bagi siswa divabel diupayakan berdasarkan kebutuhan siswa divabel sesuai dengan jenis dan derajat kekhususan serta standar yang ditentukan. Standardisasi yang berkenaan dengan aksesibilitas ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Penyediaan aksesibilitas berupa fisik dan non-fisik, antara lain sarana dan prasarana umum serta informasi yang diperlukan bagi siswa divabel untuk memperoleh kesamaan kesempatan. Davenport. (2004) mengemukakan, ketentuan di atas mengandung implikasi sebagai berikut: (1) Aksesibilitas bagi siswa divabel mencakup bidang yang seluas-luasnya sesuai dengan kebutuhan siswa divabel dengan berbagai jenis dan derajat kekhususannya, (2) Akan tetapi, pelaksanaan peraturan tersebut harus diatur lebih lanjut oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini mungkin Departemen Pekerjaan Umum dan departemen lain yang terkait setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah mengenai hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ...diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

Kapankah aksesibilitas bagi siswa divabel di Indonesia akan terwujud? Penjelasan atas Pasal 15 mengatakan, "Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam pasal ini diupayakan dalam waktu tidak terlalu lama sudah diundangkan. Mengenai aksesibilitas, khususnya sarana dan prasarana umum yang sebelum diundangkannya Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya belum ada, diberikan kesempatan mengadakan penyesuaian dengan ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya selambat-lambatnya lima tahun sejak Peraturan Pemerintah diundangkan." Ini berarti bahwa, andaikata

Peraturan Pemerintah yang dimaksud itu dapat dikeluarkan dalam waktu satu tahun ini, maka aksesibilitas bagi siswa divabel di Indonesia akan tersedia secepat-cepatnya enam tahun yang akan datang, belum terhitung proses penerimaan masyarakat luas terhadap ketentuan-ketentuan itu.

Negara seyogyanya mengakui pentingnya aksesibilitas dalam proses terciptanya kesamaan kesempatan dalam semua kegiatan masyarakat. (Sjahroeddin et al., 2019, p. 16) berpendapat, bagi para penyandang kelainan dari semua jenis kellainanna, negara-negara seyogyanya (a) memperkenalkan program aksi untuk menciptakan lingkungan fisiknya terakses; dan (b) mengambil langkah-langkah untuk menyediakan akses terhadap informasi dan komunikasi. Negara seyogyanya mengambil langkah untuk menghilangkan rintangan-rintangan bagi partisipasi di dalam lingkungan fisik. Langkah-langkah dimaksud seyogyanya berupa pengembangan standar dan pedoman serta pertimbangan untuk memberlakukan undang-undang demi menjamin aksesibilitas terhadap berbagai bidang kehidupan di masyarakat, misalnya sehubungan dengan perumahan, bangunan, pelayanan tranfortasi umum dan alat transfortasi lainnya, jalan raya dan lingkungan luar ruangan lainnya.

Organisasi Manajemen Perburuhan Internasional Kaidah ILO tentang Penanganan Penyandang Kelainan di Tempat Kerja dalam hal Aksesibilitas; Untuk memfasilitasi perekrutan penyandang kelainan dan perlindungan pekerjaan bagi pekerja yang menjadi kelainan, pengusaha perlu mengambil langkah untuk meningkatkan aksesibilitas tempat kerja bagi mereka yang menjadi penyandang kelainan dalam berbagai bentuk. Ini meliputi penyediaan gerbang/pintu masuk ke dan kemudahan bergerak di tempat kerja serta kemudahan menggunakan kamar kecil dan kamar mandi. Aksesibilitas juga dapat dipahami mencakup tanda/tulisan (bahwa sarana itu sedang digunakan), buku pedoman, petunjuk tentang tempat kerja serta informasi elektronik. Apabila perlu, ini harus ditinjau kembali, untuk aksesibilitas bagi mereka yang mempunyai kekurangan dalam penglihatan, dan terutama mereka dengan keterbelakangan intelektual.

Aksesibilitas bagi mereka yang kurang pendengaran meliputi akses ke informasi yang seringkali disampaikan dengan suara – seperti bunyi bel, bahaya kebakaran, peluit atau sirene. Sarana demikian perlu ditinjau kembali dan dilengkapi, bila perlu, dengan alat-alat alternatif seperti lampu berkedip-kedip (Farida, 2013, p. 50). Dalam merencanakan peningkatan aksesibilitas, pengusaha perlu berkonsultasi dengan pekerja penyandang kelainan dan dengan jasa konsultasi teknis, yang dapat berupa organisasi beranggotakan penyandang kelainan, dan dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Negara seyogyanya mengembangkan strategi-strategi agar pelayanan informasi dan dokumentasi dapat diakses oleh semua kelompok penyandang kelainan, Braille, rekaman dalam kaset, tulisan besar (*large print*) dan teknologi lainnya yang sesuai, seyogyanya dipergunakan untuk memberi akses terhadap informasi dan dokumentasi tertulis bagi para tuna netra. Demikian pula teknologi yang sesuai seyogyanya dipergunakan untuk memberikan akses terhadap informasi lisan bagi para tunarungu atau meraka yang mengalami kesulitan dalam hal pemahaman. Seyogyanya dipertimbangkan penggunaan bahasa isyarat dalam pendidikan anak-anak tunarungu, dalam keluarga dan masyarakat. Pelayanan penerjemahan bahasa isyarat seyogyanya juga tersediakan untuk memudahkan komunikasi antara para tunarungu dengan anggota masyarakat lainnya. Seyogyanya dipertimbangkan pula kebutuhan-kebutuhan orang yang mengalami hambatan komunikasi lainnya. (Umar et al., 2021, p. 156)

Hambatan arsitektural mempengaruhi tiga kategori kecacatan utama, yaitu: kecacatan fisik, yang mencakup mereka yang menggunakan kursi roda, dan mereka yang memiliki hambatan manipulatoris yaitu kesulitan gerak otot; kecacatan sensoris (alat indra) yang meliputi tunanetra dan tunarungu; kecacatan intelektual (tunagrahita): 1) Hambatan arsitektural bagi pengguna kursi rod: Hambatan yang dihadapi oleh para pengguna kursi roda sebagai akibat dari desain arsitektural saat ini mencakup perubahan tingkat ketinggian permukaan yang mendadak curam seperti pada tangga atau parit. Tidak adanya pertautan landai antara jalan dan trotoar. Tidak cukupnya ruang untuk lutut di bawah meja atau

wastapel. Tidak cukupnya ruang untuk berbelok, lubang pintu dan koridor yang terlalu sempit. Permukaan jalan yang renjul (misalnya karena adanya bebatuan) menghambat jalannya kursi roda, pintu yang terlalu berat dan sulit dibuka, tombol-tombol yang terlalu tinggi letaknya. 2) Masalah-masalah yang dihadapi penyandang tunadaksa/kelainan fisik: Penyandang cacat fisik atau tunadaksa yang mengalami kesulitan berjalan tetapi tidak memerlukan kursi roda. Hambatan arsitektural yang mereka hadapi antara lain mencakup tangga yang terlalu tinggi, lantai yang terlalu licin, bergerak cepat melalui pintu putar atau pintu yang menutup secara otomatis, pintu lift yang menutup terlalu cepat, tangga berjalan tanpa pegangan yang bergerak terlalu cepat. 3) Hambatan arsitektural bagi tunanetra: Yang dimaksud dengan tunanetra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali (buta total) hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak cukup baik untuk dapat membaca tulisan biasa meskipun sudah dibantu dengan kaca mata. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi para tunanetra sebagai akibat dari desain arsitektural selama ini antara lain: Tidak adanya petunjuk arah atau ciri-ciri yang dapat didengar atau dilihat dengan penglihatan terbatas yang menunjukkan nomor lantai pada gedung-gedung bertingkat. Rintangan-rintangan kecil seperti jendela yang membuka ke luar atau papan reklame yang dipasang di tempat pejalan kaki, cahaya yang menyilaukan atau terlalu redup, lift tanpa petunjuk taktual/huruf braille (dapat diraba) untuk membedakan bermacam-macam tombol, atau petunjuk suara untuk menunjukkan nomor lantai. 4) Masalah yang dihadapi tunarungu: Para tunarungu tidak mungkin dapat memahami pengumuman melalui pengeras suara di kelas atau sekolah. Mereka juga mengalami kesulitan membaca bibir di auditorium dengan pencahayaan yang buruk, dan mereka mungkin tidak dapat mendengar bunyi tanda bahaya. 5) Kesulitan tunagrahita: Para penyandang kelainan intelektual akan mengalami kesulitan mencari jalan di dalam lingkungan baru jika di sana tidak terdapat petunjuk jalan yang jelas dan baku. 6) Konflik kepentingan antar berbagai kategori kelainan: Sebagaimana dapat dilihat dari bagian-bagian terdahulu, satu kategori kelainan mempunyai kebutuhan aksesibilitas yang berbeda dari kategori kelainan lainnya. Di samping itu, terdapat variasi individual di dalam setiap kategori kelainan dan terdapat sejumlah besar orang yang menyandang kelainan ganda. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan suatu kriteria desain yang dapat memuaskan semua penyandang kelainan.

Keterbatasan-keterbatasan yang ada pada kursi roda serta terbatasnya kapabilitas fisik pengguna kursi roda, maka sering terdapat situasi di mana tuntutan orang non-kelainan berbeda dari tuntutan para pengguna kursi roda. Hal ini sehubungan dengan sirkulasi vertikal (turun/naiknya permukaan lahan), licin/ kasarnya permukaan lantai, keluasan ruangan, aktivitas sanitasi, lokasi tombol lampu dan lift. Misalnya, bagi penyandang kelainan fisik, tangga-tangga yang dirancang secara teliti akan lebih memudahkan daripada permukaan landai. Permukaan lantai yang rata dan licin akan sangat baik bagi pengguna kursi roda tetapi berbahaya bagi orang semi-ambulant jika basah. Meskipun pengguna kursi roda jumlahnya kecil dibandingkan dengan kelompok penyandang kelainan lainnya, namun implikasinya bagi perancang bangunan dalam banyak hal paling besar. Contoh konflik kepentingan lainnya adalah sehubungan dengan desain trotoar. Pertautan yang landai antara jalan raya dan trotoar memberi akses bagi para pengguna kursi roda tetapi kurang baik bagi para tunanetra yang menggunakan tongkat untuk mendeteksi batas antara trotoar dan jalan raya. Berikut ini contoh bentuk aksesibilitas adalah, memberi "tanjakan" atau ramp pada jalur tangga, supaya mereka yang menggunakan kursi roda atau yang tidak sanggup naik tangga, tetap bisa melewatinya. Juga pegangan pada setiap jalan, atau kamar mandi, ruang menuju kelas, lantai timbul untuk tunanetra.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor penghambat manajemen aksesibilitas (Husna Nashihin et al., 2021) bagi siswa difabel dalam mengikuti pembelajaran di sekolah dasar inklusi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi sekolah dasar inklusi dalam memahami manajemen yang baik (Hafidz, 2021) mengenai siswa difabel sehingga potensi mereka dapat berkembang dengan optimal.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2019), dengan subjek penelitian Sampel dalam penelitian ini adalah para siswa berkebutuhan khusus yang sedang mengikuti pendidikan tingkat Sekolah Dasar inklusi di lima kota (kota Yogyakarta, Bantul, Sleman, Kulonprogo, dan Gunungkidul). Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah sampel nonprobabilitas, tepatnya adalah menggunakan metode *quota sampling*. Berdasarkan metode ini ditetapkan jumlah kuota responden di masing-masing kota yaitu (1) di kota Yogyakarta 25 anak; (2) Bantul 25 anak; (3) Kulonprogo 25 orang; (4) Sleman 25 anak; dan (5) Gunungkidul 25 anak berkebutuhan khusus., sedangkan objek penelitiannya yaitu faktor penghambat manajemen aksesibilitas bagi siswa difabel dalam mengikuti pembelajaran di sekolah dasar inklusi. Penelitian ini dilaksanakan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari empat kota kabupaten dan satu kota madya yang telah menyelenggarakan sekolah inklusi. Sumber data adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau informan (data primer), dan data yang diperoleh secara tidak langsung, yakni dari instansi terkait (data sekunder). Data primer antara lain tentang identitas responden, informasi tentang Sekolah Inklusi, persepsi responden berkaitan dengan aspek sosial, dan aspek kebendaan atau aksesibilitas. Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain: angket, dokumentasi, interview terstruktur dan mendalam. Adapun teknik analisa data yang digunakan berupa reduksi data, display data dan verifikasi data atau membuat kesimpulan hasil penelitian. (Sugiyono, 2022)

Hasil dan Pembahasan

Bagi siswa difabel di Sekolah Dasar inklusi kenyataan menghadapi berbagai hambatan arsitektural di dalam bangunan-bangunan dan fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi kepentingan umum (Farrel, Michael, 2008). Ternyata tidak selalu mudah atau bahkan sering tidak memungkinkan bagi para penyandang kelainan untuk berpartisipasi penuh dalam situasi normal, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan maupun rekreasi (Robbaniyah et al., 2022). Beberapa contoh hambatan arsitektural adalah tidak adanya trotoar, permukaan jalan yang tidak rata, tepian jalan yang tinggi, lubang pintu yang terlalu sempit, lantai yang terlalu licin, tidak tersedianya tempat parkir yang sesuai, tidak tersedia lift, fasilitas sanitasi yang terlalu sempit, telepon umum yang terlalu tinggi, tangga yang tidak berpagar pengaman, jendela atau papan reklame yang menghalangi jalan, dan masih banyak lagi.

Hal-hal tersebut di atas, menjadi masalah bagi siswa difabel dari jenis dan derajat kekhususannya tertentu sehingga mereka tidak dapat merealisasikan kesamaan haknya sebagai warga masyarakat. Farrel, Michael (2008) sesungguhnya para penyandang kelainan tidak mengharapkan dan tidak pula memerlukan lebih banyak hak daripada orang-orang pada umumnya. Mereka hanya menghendaki agar dapat bergerak di dalam lingkungannya dengan tingkat kenyamanan, kemudahan dan keselamatan yang sama dengan warga masyarakat lainnya (Robbaniyah, 2022), memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang normal, dapat semandiri mungkin dalam batas-batas kemampuannya. Tersedianya bangunan dan fasilitas yang dapat diakses oleh semua orang merupakan persoalan kesamaan kesempatan dan keadilan sosial. Akses terhadap fasilitas-fasilitas umum merupakan hak, bukan pilihan semata. Lebih dari itu, penataan lingkungan yang sesuai dengan kaidah aksesibilitas akan juga memberikan lebih banyak kenyamanan bagi warga masyarakat pada umumnya.

Hambatan arsitektural mempengaruhi tiga kategori kelainan utama, yaitu: (1) kelainan fisik, yang mencakup mereka yang menggunakan kursi roda, semi-ambulant, dan mereka yang memiliki hambatan manipulatoris yaitu kesulitan gerak otot; (2) kelainan sensoris (alat indra) yang meliputi orang tunanetra dan tunarungu; kelainan intelektual (tunagrahita). Hambatan yang dihadapi oleh para pengguna kursi roda sebagai akibat dari

desain arsitektural saat ini mencakup: Perubahan tingkat ketinggian permukaan yang mendadak seperti pada tangga atau parit; Tidak adanya pertautan landai antara jalan dan trotoar; Tidak cukupnya ruang untuk lutut di bawah meja atau wastapel; Tidak cukupnya ruang untuk berbelok, lubang pintu dan koridor yang terlalu sempit; Permukaan jalan yang renjul (misalnya karena adanya bebatuan) menghambat jalannya kursi roda; Pintu yang terlalu berat dan sulit dibuka; tombol-tombol yang terlalu tinggi letaknya.

Masalah-masalah yang dihadapi penyandang tunadaksa; adalah mereka yang mengalami kesulitan berjalan tetapi tidak memerlukan kursi roda; Hambatan arsitektural yang mereka hadapi antara lain mencakup: (1) tangga yang terlalu tinggi; (2) lantai yang terlalu licin; (3) bergerak cepat melalui pintu putar atau pintu yang menutup secara otomatis; (4) pintu lift yang menutup terlalu cepat; (5) tangga berjalan tanpa pegangan yang bergerak terlalu cepat. Hambatan arsitektural bagi tunanetra; yang dimaksud dengan tunanetra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali (buta total) hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak cukup baik untuk dapat membaca tulisan biasa meskipun sudah dibantu dengan kaca mata. Karten, Toby J. (2008), kesulitan-kesulitan yang dihadapi penyandang tunanetra sebagai akibat dari desain arsitektural selama ini antara lain: (1) tidak adanya petunjuk arah atau ciri-ciri yang dapat didengar atau dilihat dengan penglihatan terbatas yang menunjukkan nomor lantai pada gedung-gedung bertingkat; (2) rintangan-rintangan kecil seperti jendela yang membuka ke luar atau papan reklame yang dipasang di tempat pejalan kaki; (3) cahaya yang menyilaukan atau terlalu redup; (4) lift tanpa petunjuk taktual (dapat diraba) untuk membedakan bermacam-macam tombol, atau petunjuk suara untuk menunjukkan nomor lantai.

Masalah yang dihadapi tunarungu; para tunarungu tidak mungkin dapat memahami juga mengalami kesulitan membaca bibir di auditorium dengan pencahayaan yang buruk, dan mereka mungkin tidak dapat mendengar bunyi tanda bahaya. Kesulitan Tunagrahita; Para penyandang kelainan intelektual akan mengalami kesulitan mencari jalan di dalam; Konflik Kepentingan Antar Berbagai Kategori Kelainan; Sebagaimana dapat dilihat dari bagian-bagian terdahulu, satu Kategori kelainan mempunyai kebutuhan Aksesibilitas yang berbeda dari kategori kelainan lainnya. Di samping itu, terdapat variasi individual di dalam setiap kategori kelainan dan terdapat sejumlah besar orang yang menyandang kelainan ganda. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan suatu kriteria desain yang dapat memuaskan semua penyandang kelainan. Karena keterbatasan-keterbatasan yang ada pada kursi roda serta terbatasnya kapabilitas fisik pengguna kursi roda, Maka sering terdapat situasi di mana Tuntutan orang non-cacat dan semi-ambulant berbeda dari Tuntutan para Pengguna kursi roda Sehubungan Dengan sirkulasi vertikal (turun/naiknya permukaan lahan), licin/kasarnya permukaan lantai, keluasan ruangan, aktivitas sanitasi, lokasi tombol lampu dan lift. Misalnya, bagi penyandang semi-ambulant, tangga-tangga yang dirancang secara teliti akan lebih memudahkan daripada permukaan landai. Permukaan lantai yang rata dan licin akan sangat baik bagi Pengguna kursi roda tetapi berbahaya bagi orang semi-ambulant jika basah. Meskipun Pengguna kursi roda jumlahnya kecil dibandingkan Dengan kelompok penyandang cacat lainnya, namun implikasinya bagi perancang bangunan dalam banyak hal paling besar. Contoh Konflik kepentingan lainnya adalah sehubungan dengan desain trotoar. Pertautan yang landai antara jalan raya dan trotoar memberi akses bagi para pengguna kursi roda tetapi kurang baik bagi para tunanetra yang menggunakan tongkat untuk mendeteksi batas antara trotoar dan jalan raya. Namun demikian, berbagai konflik kepentingan tersebut sejauh tertentu masih dapat dikompromikan.

Simpulan

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, dapat disimpulkan bahwa manajemen aksesibilitas adalah kemudahan yang diberikan kepada siswa difabel berupa pengadaan atau modifikasi sarana dan prasarana kehidupan sehari-hari, termasuk lingkungan fisik, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penyandang kelainan di sekolah inklusi, agar mereka dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Manajemen aksesibilitas fisik sebagai satu aspek dari aksesibilitas secara menyeluruh bagi siswa difabel adalah penyesuaian desain arsitektural lingkungan fisik agar siswa difabel dapat bergerak secara leluasa di dalamnya dan dapat menggunakan segala fasilitas yang tersedia. Aksesibilitas fisik merupakan faktor yang amat penting untuk menunjang kemandirian para penyandang kelainan agar mereka dapat memperoleh kesamaan kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan di masyarakat luas, masing-masing kategori kelainan memiliki kebutuhan aksesibilitas fisik yang berbeda sesuai dengan keterbatasan yang diakibatkan oleh kelainannya, dimana desain arsitektural lingkungan fisik selama ini sering menimbulkan hambatan bagi aktivitas kehidupan sehari-hari para penyandang kelainan. Aspek sosial, alasan pokok yang menghambat aksesibilitas penyandang kelainan mengikuti pendidikan di sekolah inklusi adalah mengalami kesulitan ketika melakukan aktifitas di sekolah serta aspek kebendaan atau manajemen aksesibilitas siswa difabel mengikuti pembelajaran di Sekolah Dasar inklusi adalah ketersediaan fasilitas pendidikan, kelengkapan fasilitas lingkungan gedung sekolah dan media pembelajaran misalnya perpustakaan kurang memadai, bagi kepentingan siswa berkebutuhan khusus, hal ini dikarenakan perhatian sekolah kurang dan dana tidak mendukung.

Daftar Pustaka

- Farida, U. (2013). Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pedesaan Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.14710/jwl.1.1.49-66>
- Hafidz, H. N. (2021). IMPLEMENTASI TOTALQUALITY MANAGEMENT (TQM) DI MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL HUDA YOGYAKARTA. *As-Sibyan*, 3(2), 37–50. https://doi.org/10.52484/as_sibyan.v3i2.189
- Husna Nashihin. (2017). *Pendidikan Akhlak Kontekstual*. CV. Pilar Nusantara. <https://books.google.co.id/books?id=UBWiDwAAQBAJ>
- Husna Nashihin, Nazid Mafaza, & M.Okky Haryana. (2021). IMPLEMENTASI TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) PERSPEKTIF TEORI EDWARD DEMING, JURAN, DAN CROSBY. *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 50–60. <https://doi.org/10.51468/jpi.v3i1.60>
- Jannah, I. R., Zuhdiyah, Z., & Utami, F. T. (2021). Kreativitas Mengajar Guru pada Anak Berkebutuhan Khusus di SLB-B Negeri Pembina Palembang. *Indonesian Journal of Behavioral Studies*, 1(1), 61–77. <https://doi.org/10.19109/ijobs.v1i1.9260>
- Kota, C., Nurfadhillah, S., Syariah, E. N., Mahromiyati, M., & Nurkamilah, S. (n.d.). *Khusus (Autisme) Di Sekolah Inklusi Sdn*. 3, 459–465.
- Nashihin, H. (2019a). *Analisis Wacana Kebijakan Pendidikan (Konsep dan Implementasi)*. CV. Pilar Nusantara. <https://books.google.co.id/books?id=SXcqEAAAQBAJ>
- Nashihin, H. (2019b). Konstruksi Budaya Sekolah Sebagai Wadah Internalisasi Nilai Karakter. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 8(1), 131–149.
- Noya, J. E., & Ambarwati, K. D. (2020). Gambaran Interaksi sosial anak autisme di Sekolah Inklusi Multi Talenta Samarinda. In *Jurnal Psikologi Perseptual* (Vol. 3, Issue 2, pp. 65–78). <https://doi.org/10.24176/perseptual.v3i2.2642>
- Ridha, S., Ngasimurrohman, M., Ulfaini, R., Ekarini, A., & Ibrahim. (2020). Problems of students with hearing disabilities in learning mathematics in inclusive schools. *JPM UIN Antasari*, 7(1), 8–18.
- Robbaniyah, Q. (2022). Eksplorasi Strategi Kontra Radikalisme pada Santri di Pondok

- Pesantren Islamic Center Bin Baz Yogyakarta. *AMORTI: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, X(X), 1–10.
- Robbaniyah, Q., Lina, R., Ustadz, S., Rofiq, A., Islami, F. Al, & Faiz, A. (2022). Kontribusi Pemikiran Abu Nida ` dalam Pengembangan Pendidikan Islam Pondok Pesantren di Indonesia. *JIPSI: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sains Islam Interdisipliner*, 1(1), 23–34.
- Salmah, S., & Tamjidnoor, T. (2019). Aksesibilitas Pendidikan Bagi Kaum Disabilitas Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (Min) Di Kota Banjarmasin. *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 18(1), 127. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v18i1.2995>
- Seila Rixkina, Armanila, Amsi Yuningsih, W. F. (2022). *Guru dan Strategi Penanganan Pada Anak Dengan Masalah Emosional Abstrak*. 10(2), 1–11.
- Shafa Ridha S.A, Muhamad Ngasimurrohman, Riyana Ulfaini, Aulia Ekarini, I. (2021). *PROBLEMATIKA SISWA DIFABEL RUNGU DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI SEKOLAH INKLUS*. 08(1), 1–17.
- Sjahroeddin, B. M., Sachari, A., Triharini, M., & DRSAS, M. I. (2019). Kamasan: Goldsmith Tradisional Sunda. *Jurnal Rupa*, 3(2), 93. <https://doi.org/10.25124/rupa.v3i2.1498>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif* (3rd ed.). Alfabeta.
- Ting, T. C. (2007). Policy Developments in Pre-School Education in Singapore: A Focus on the Key Reforms of Kindergarten Education. *International Journal of Child Care and Education Policy*, 1(1), 35–43. <https://doi.org/10.1007/2288-6729-1-1-35>
- Umar, F., Nur, K. W., Paddiyatu, N., & Amalia, A. A. (2021). Persepsi Difabel Penglihatan Terhadap Arsitektur Kota (Studi Kasus Kota Makassar). *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 4(1), 144–152. <https://doi.org/10.17509/jaz.v4i1.30962>
- Wardani, Tarsidi Didi, Hernawati Tati, A. (2020). *Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus* (7th ed.). Universitas Terbuka.
- Wartanto, R. (2016). *Model Pembelajaran Langsung Terhadap Keterampilan Menulis Kalimat Dasar Anak Tunarungu Kelas 1 SDLB-B*. 1–23.